

**STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL GUNA MENDUKUNG
KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN DI ERA SOCIETY 5.0
(FISCAL POLICY STRATEGY TO SUPPORT
INDEPENDENCE OF THE DEFENSE INDUSTRY IN THE ERA OF
SOCIETY 5.0)**

Hariyantana Aygy Yolanda¹, Aries Sudiarso², Ib Putra Jhandana³
222018242.hayaygy@gmail.com¹
Universitas Pertahanan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan fiskal yang efektif dalam mendukung kemandirian industri pertahanan di era Society 5.0. Dengan menggunakan metode kepustakaan dan analisis deskriptif, data dikumpulkan dari sumber-sumber terpercaya seperti jurnal, artikel, dan buku yang terkait dengan strategi kebijakan fiskal dalam industri pertahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa strategi kebijakan fiskal yang efektif meliputi peningkatan anggaran pertahanan, pemberian insentif pajak, skema pembiayaan khusus, kerjasama strategis dengan negara maju, dan pengembangan sumber daya manusia. Kemandirian industri pertahanan memberikan manfaat yang signifikan, seperti peningkatan kemampuan pertahanan negara, pengurangan ketergantungan pada impor, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, teknologi yang belum memadai, dan kurangnya integrasi dalam ekosistem industri pertahanan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi kebijakan fiskal yang tepat dan implementasi yang efektif sangat penting dalam mendukung kemandirian industri pertahanan Indonesia di era Society 5.0. Kerjasama erat antara pemerintah, industri pertahanan, akademisi, dan masyarakat juga menjadi kunci dalam merumuskan dan melaksanakan strategi ini secara efektif.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Kemandirian Industri Pertahanan, Society 5.0, Teknologi, Keamanan Nasional.

ABSTRACT

This study aims to analyze effective fiscal policy strategies in supporting the independence of the defense industry in the era of Society 5.0. Using literature methods and descriptive analysis, data were collected from reliable sources such as journals, articles, and books related to fiscal policy strategy in the defense industry. The results showed that some effective fiscal policy strategies include increasing defense budgets, providing tax incentives, special financing schemes, strategic cooperation with developed countries, and human resource development. The independence of the defense industry provides significant benefits, such as increased national defense capabilities, reduced dependence on imports, and job creation. However, challenges include budget constraints, inadequate technology, and lack of integration in the defense industry ecosystem. Thus, this study concludes that appropriate fiscal policy strategies and effective implementation are essential in supporting the independence of Indonesia's defense industry in the era of Society 5.0. Close cooperation between government, defense industry, academia, and society is also key in effectively formulating and implementing this strategy.

Keywords: Fiscal Policy, Defense Industry Independence, Society 5.0, Technology, National Security.

PENDAHULUAN

Dalam era Society 5.0, industri pertahanan dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti perkembangan teknologi yang begitu pesat, kompetisi global yang semakin ketat, dan pola ancaman yang semakin kompleks (Singh, 2023). Era Society 5.0 ditandai oleh kerja sinergis antara manusia dan mesin, dengan perkembangan teknologi seperti artificial intelligence (AI), big data, dan internet of things (IoT) yang menjadi ciri khasnya (Kumar & Lee, 2022). Perkembangan teknologi yang pesat ini menuntut industri pertahanan untuk berinovasi dengan cepat agar dapat menghasilkan produk pertahanan yang inovatif dan kompetitif (Choi & Tan, 2021), sehingga industri tersebut mampu bersaing secara ketat dengan produk luar negeri dan memiliki daya saing yang tinggi. Dalam konteks tren global industri pertahanan, penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), big data analytics, dan pengembangan teknologi satelit semakin menjadi fokus utama (Smith, 2023). Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia telah menginvestasikan sumber daya yang besar untuk mengembangkan teknologi ini dalam alutsista mereka (Johnson, 2022). Selain memiliki daya saing yang cukup, industri pertahanan juga harus cekatan dalam menghadapi berbagai ancaman yang beragam (Gupta, 2020). Inovasi dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti akademisi, industri lain, dan pemerintah menjadi kunci dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada (Lim & Patel, 2023).

Industri pertahanan merupakan salah satu industri strategis yang berperan penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara (Ramadhan, 2022). Industri pertahanan yang kuat dapat menjamin ketersediaan alutsista yang memadai untuk pertahanan negara. Dengan pertahanan yang kuat, tentunya perlu adanya komitmen dan keseriusan yang lebih dari pemerintah dan pihak lainnya. Namun, kondisi industri pertahanan Indonesia masih memerlukan perbaikan signifikan, terutama terkait keterbatasan sumber daya alam, finansial, dan teknologinya (Ramadhan, 2022). Hal ini mengharuskan Indonesia untuk bekerja lebih keras lagi dalam mencapai target kemandirian industri pertahanan.

Kemandirian industri pertahanan dapat diartikan sebagai kemampuan industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara secara mandiri. Saat ini, Indonesia masih mengandalkan produk alutsista dari luar negeri, sehingga kemandirian industri pertahanan masih jauh dari kata optimal (Ramadhan, 2022).

Indonesia juga termasuk kedalam pengimpor terbesar alutsista. Impor alutsista di Indonesia didominasi oleh alutsista untuk pertahanan udara dan laut. Alutsista untuk pertahanan udara yang diimpor Indonesia meliputi pesawat tempur, rudal, dan radar, sementara alutsista untuk pertahanan laut termasuk kapal perang, kapal selam, dan rudal. Meskipun beberapa kebutuhan alutsista sudah dipenuhi oleh industri pertahanan dalam negeri, pengembangannya masih menjadi fokus utama pemerintah untuk menguatkan pertahanan dan keamanan (Ramadhan, 2022).

Dalam rangka mencapai kemandirian dalam pengadaan alutsista, pemerintah mengambil langkah strategis melalui Masterplan Industri Pertahanan. Masterplan ini mencakup rencana untuk memenuhi kebutuhan alutsista dalam mencapai Minimum Essential Force (MEF) pada tahun 2024 dan mencapai kemandirian pengadaan alutsista pada tahun 2029 (Ramadhan, 2022). Dengan adanya masterplan ini, diharapkan bahwa Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya pada impor alutsista serta meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam memenuhi kebutuhan pertahanan negara secara mandiri.

Untuk mencapai kemandirian ini, dibutuhkan komitmen dan keseriusan yang lebih besar. Keterbatasan sumber daya alam, finansial, dan teknologi menjadi tantangan utama. Negara-negara seperti Korea Selatan dan Israel telah berhasil mencapai tingkat

kemandirian yang signifikan dalam industri pertahanan (Choi & Cohen, 2021). Negara-negara yang telah berhasil mencapai kemandirian cenderung memiliki kerjasama yang erat antara pemerintah, perusahaan pertahanan lokal, lembaga riset, dan universitas. Contoh nyata adalah pengembangan teknologi radar canggih di Korea Selatan yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta. Salah satu kunci keberhasilan mereka adalah kebijakan fiskal yang mendukung secara substansial pengembangan teknologi dan produksi alutsista secara lokal. Korea Selatan, misalnya, telah berhasil mengembangkan pesawat tempur dan sistem pertahanan udara yang mampu bersaing di pasar global, yang sebagian besar didukung oleh investasi pemerintah dalam riset dan pengembangan.

Kebijakan fiskal adalah salah satu instrumen penting yang dapat digunakan pemerintah untuk mendukung kemandirian industri pertahanan (Aqmarina, 2020). Pemerintah Indonesia telah menetapkan sasaran kemandirian industri pertahanan sebesar 50% pada tahun 2024. Namun, pencapaian sasaran tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya industri pertahanan yang kuat (Ramadhan, 2022). Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan industri pertahanan. Salah satu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah peningkatan anggaran pertahanan. Anggaran pertahanan Indonesia pada tahun 2022 mencapai Rp. 110,7 triliun, meningkat 13,5% dari tahun sebelumnya (Ramadhan, 2022). Kebijakan fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena dengan kebijakan fiskal pemerintah dapat mempengaruhi keadaan pasar (Aqmarina, 2020). Pemerintah dapat berperan aktif melalui instrumen seperti insentif pajak dan skema pembiayaan khusus untuk mendorong investasi di bidang penelitian dan pengembangan (R&D) alutsista. Selain itu, kebijakan fiskal yang memberikan insentif pajak kepada perusahaan produsen komponen pertahanan dalam negeri dapat meningkatkan daya saing industri nasional dan mengurangi ketergantungan impor. Pengelolaan anggaran yang tepat untuk transfer teknologi dari negara lain juga menjadi langkah penting (Ramadhan, 2022). Dengan kolaborasi strategis, Indonesia dapat memperoleh teknologi canggih untuk pengembangan alutsista mutakhir. Investasi di sektor ini pun akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan anggaran pertahanan tidak hanya memperkuat pertahanan nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pengembangan sektor terkait lainnya.

Untuk mencapai kemandirian industri pertahanan, diperlukan komitmen dan strategi yang tepat dari pemerintah dan berbagai pihak terkait. Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen penting yang dapat digunakan untuk mendukung kemandirian industri pertahanan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan fiskal yang paling efektif untuk mendukung kemandirian industri pertahanan di era Society 5.0. Penelitian ini juga akan mengkaji isu-isu terkini yang terkait dengan industri pertahanan, seperti proliferasi teknologi senjata dan ancaman siber, serta merumuskan rekomendasi konkret kepada pemerintah terkait instrumen kebijakan fiskal yang tepat guna.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan Indonesia di era Society 5.0, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang berdaulat dan memiliki kemampuan pertahanan yang kuat.



Sumber Master Plan Pertahanan
Gambar 1. MasterPlan Industri Pertahanan

METODE PENELITIAN

Jenis data dan Sumber

Data diperoleh dengan menggunakan metode kepustakaan, yaitu menggunakan dokumen, buku, arsip, tulisan, gambar yang berupa laporan serta keterangan untuk memperoleh informasi dan data terkait strategi kebijakan fiskal dalam industri pertahanan. Referensi yang digunakan antara lain adalah penelitian oleh Singh (2023), Kumar & Lee (2022), Choi & Tan (2021), Smith (2023), Johnson (2022), Gupta (2020), Lim & Patel (2023), Ramadhan (2022), Aqmarina (2020), Choi & Cohen (2021), dan sumber lain yang relevan dengan konteks penelitian ini.

Metode analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti pendekatan kuantitatif dengan fokus pada deskripsi analitik yang mendalam. Langkah awal melibatkan identifikasi variabel penting terkait kebijakan fiskal dalam mendukung kemandirian industri pertahanan Indonesia di era Society 5.0. Data yang relevan dikumpulkan melalui sumber-sumber berkualitas seperti jurnal, artikel, dan buku yang berkaitan dengan strategi kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah. Analisis deskriptif kemudian dilakukan untuk menguraikan secara sistematis informasi yang terkumpul, termasuk anggaran pertahanan, insentif pajak, dan skema pembiayaan yang telah diterapkan. Selanjutnya, analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan strategi Indonesia dengan negara-negara yang telah berhasil mencapai kemandirian dalam industri pertahanan, dengan tujuan mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan potensi perbaikan. Hasil analisis ini akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi konkret kepada pemerintah terkait dengan instrumen kebijakan fiskal yang lebih efektif dalam mencapai kemandirian industri pertahanan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang substansial dalam menghadapi tantangan kompleks di bidang pertahanan, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi dan persaingan global yang semakin ketat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, temuan penting terkait strategi kebijakan fiskal yang efektif untuk mendukung kemandirian industri pertahanan di era Society 5.0 mencakup peningkatan anggaran pertahanan, pemberian insentif pajak, skema pembiayaan khusus, kerjasama strategis, dan pengembangan sumber daya manusia.

Peningkatan Anggaran Pertahanan

Peningkatan anggaran pertahanan menjadi prioritas dalam mendukung kemandirian industri pertahanan. Korea Selatan merupakan contoh sukses yang mengalokasikan sekitar 2,7% dari PDB mereka untuk anggaran pertahanan, yang signifikan meningkatkan kemampuan industri pertahanan mereka (Johnson, 2022). Dengan meningkatnya anggaran, pemerintah dapat memperkuat pengembangan alutsista termasuk penelitian dan pengembangan teknologi inovatif (Kumar & Lee, 2022).

Insentif Pajak

Pemberian insentif pajak seperti potongan pajak penghasilan telah menarik investasi di sektor industri pertahanan. Korea Selatan memberikan insentif pajak signifikan bagi perusahaan pertahanan lokal yang mendorong pertumbuhan industri pertahanan domestik (Gupta, 2020). Pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) juga dapat memberikan dorongan positif bagi industri pertahanan dalam negeri (Lim & Patel, 2023).

Skema Pembiayaan Khusus:

Pemerintah dapat mengimplementasikan skema pembiayaan khusus dengan bunga rendah untuk mendukung pengembangan alutsista (Ramadhan, 2022). Skema pembiayaan khusus dengan bunga rendah dapat mendukung pengembangan alutsista. Israel menggunakan skema pembiayaan berupa pinjaman lunak dengan bunga rendah untuk mendukung produksi pesawat tempur mereka (Johnson, 2022). , Jepang telah berhasil mengembangkan teknologi pertahanan melalui skema pembiayaan yang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan lokal (Choi & Cohen, 2021). Skema pembiayaan yang mendukung memudahkan perusahaan pertahanan lokal mengakses modal dan mendorong produksi alutsista dalam negeri.

Kerjasama Strategis:

Kerjasama strategis dengan negara-negara maju dalam industri pertahanan menjadi sarana transfer teknologi yang penting. Kerjasama dengan Amerika Serikat dalam pengembangan teknologi radar canggih telah membantu Korea Selatan meningkatkan kemampuan pertahanan udara mereka (Aqmarina, 2020). Amerika Serikat dan Jerman sering kali melakukan kerjasama dalam pengembangan teknologi pertahanan (Kumar & Lee, 2022). Joint venture atau co-production dapat membantu Indonesia memperoleh teknologi dan keahlian untuk mengembangkan alutsista lokal yang kompetitif di pasar global.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam industri pertahanan sangat penting. Program pendidikan dan pelatihan vokasi yang fokus pada teknologi pertahanan dapat menghasilkan tenaga kerja berkualitas (Singh, 2023). Kolaborasi dengan lembaga riset dan universitas dalam program riset dan pengembangan juga dapat meningkatkan kemampuan SDM dalam menghasilkan inovasi yang dibutuhkan dalam industri pertahanan (Kumar & Lee, 2022).

Contoh kasus nyata dari implementasi strategi ini di berbagai negara adalah Korea Selatan yang berhasil meningkatkan industri pertahanan mereka melalui peningkatan anggaran dan kerjasama strategis dengan negara maju. Israel juga menggunakan skema pembiayaan khusus untuk mendukung produksi pesawat tempur mereka. Singapura telah berhasil mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui program pendidikan dan pelatihan dalam industri pertahanan (Aqmarina, 2020; Gupta, 2020; Singh, 2023).

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan fiskal yang efektif untuk mendukung kemandirian industri pertahanan di era Society 5.0 harus memperhatikan beberapa aspek penting (Johnson, 2022). Salah satunya adalah peningkatan anggaran pertahanan, yang merupakan langkah fundamental dalam menyediakan sumber daya yang cukup bagi pengembangan industri pertahanan (Ramadhan, 2022). Contohnya, Korea Selatan berhasil mengalokasikan sekitar 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) mereka untuk anggaran pertahanan, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan industri pertahanan mereka (Johnson, 2022).

Namun, peningkatan anggaran pertahanan perlu dibarengi dengan instrumen kebijakan lain yang tepat sasaran (Ramadhan, 2022). Salah satunya adalah pemberian insentif pajak, yang dapat menarik investasi di sektor industri pertahanan baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Aqmarina, 2020). Insentif pajak ini dapat berupa potongan pajak penghasilan, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN), atau bahkan tax holiday untuk proyek-proyek strategis (Gupta, 2020).

Selain itu, skema pembiayaan khusus juga merupakan instrumen penting dalam mendukung kemandirian industri pertahanan (Ramadhan, 2022). Pemerintah dapat menyediakan pinjaman dengan bunga rendah atau bahkan hibah untuk proyek-proyek riset dan pengembangan (Johnson, 2022). Contohnya, Jepang telah berhasil mengembangkan teknologi pertahanan melalui skema pembiayaan yang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan lokal (Choi & Cohen, 2021).

Kerjasama strategis juga menjadi faktor kunci dalam mencapai kemandirian industri pertahanan (Ramadhan, 2022). Negara-negara dengan industri pertahanan maju seperti Amerika Serikat dan Jerman sering kali melakukan kerjasama dalam pengembangan teknologi pertahanan (Kumar & Lee, 2022). Dengan demikian, Indonesia perlu menjalin kemitraan yang kuat dengan negara-negara yang memiliki teknologi dan keahlian dalam industri pertahanan untuk mempercepat pengembangan kemampuan industri dalam negeri (Choi & Cohen, 2021).

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga tidak kalah pentingnya (Ramadhan, 2022). Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri pertahanan (Singh, 2023). Selain itu, program riset dan pengembangan yang melibatkan kolaborasi antara akademisi, pakar industri, dan pemerintah dapat mempercepat inovasi dan pengembangan teknologi pertahanan (Kumar & Lee, 2022).

Penting untuk mencatat bahwa dalam menerapkan strategi kebijakan fiskal ini, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan prioritas pembangunan nasional lainnya (Johnson, 2022). Analisis yang cermat dan komprehensif perlu dilakukan sebelum mengambil keputusan terkait strategi kebijakan fiskal untuk industri pertahanan.

Koordinasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan juga menjadi kunci keberhasilan (Lim & Patel, 2023). Kerjasama antara pemerintah, industri pertahanan, akademisi, dan masyarakat sangat penting dalam merumuskan dan melaksanakan strategi kebijakan fiskal yang efektif untuk mendukung kemandirian industri pertahanan di era Society 5.0.

PENTINGNYA KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN

Dalam memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara maka di perlukan sarana prasarana peralatan pertahanan dan keamanan melalui pembangunan industri pertahanan yang diawali dengan memperkuat industri pertahanan. Upaya pengembangan kemandirian industri pertahanan tidak bisa dilakukan secara parsial dan sektoral, namun

perlu dilakukan adanya koordinasi, kerjasama dan sinergitas dari semua pihak terkait dengan usaha untuk mencapai kemandirian dibidang industri pertahanan (efendie, et all, 2022). Dalam mengurangi ketergantungan indonesia terhadap produk impor alutsista maka diperlukannya kemandirian industri pertahanan. Kemandirian industri pertahanan merupakan hal yang penting untuk memperkuat pertahanan negara dan menjaga kedaulatan bangsa indonesia. Dengan adanya kemandirian industri pertahanan dapat memberikan beberapa manfaat:

a) Meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Industri pertahanan yang mandiri tentunya akan mampu menghasilkan produk-produk pertahanan yang sesuai dengan kebutuhan negaranya. Hal ini juga dapat meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi berbagai ancaman. Kualitas produk yang dihasilkan oleh industri pertahanan yang mandiri akan lebih baik daripada produk pertahanan yang impor dikarenakan industri pertahanan yang mandiri akan lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Kemampuan industri pertahanan yang mandiri tentunya akan mampu menghasilkan produk pertahanan yang inovasi serta kompetitif hal ini dikarenakan kemampuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan (R&D) terhadap produk-produk alutsista sehingga dapat mengembangkan teknologi bersama dengan alutsista yang ada menghasilkan teknologi pertahanan yang baru sehingga tidak perlu lagi bergantung supply pasokan dari luar negeri. Dengan meningkatkan kualitas, ketersediaan dan kemandirian teknologi produk-produk pertahanan maka kemampuan pertahanan negara juga akan meningkat. Kemampuan negara akan mampu menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri.

b) Mengurangi ketergantungan impor

Pada saat ini indonesia masih mengimpor sebagian besar produk-produk pertahanan seperti pesawat tempur, rudal kapal perang dan tank. Sehingga menyebabkan indonesia harus mengeluarkan devisa yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara. Dengan kemandirian industri pertahanan, indonesia mampu memproduksi sendiri produk-produk alutsista yang dibutuhkan. Sehingga mampu menghemat devisa negara dan meningkatkan kemandirian ekonomi negara. Dengan mengurangi ketergantungan impor produk-produk alutsista, industri pertahanan akan mampu lebih kompetitif di pasar global. Sehingga industri pertahanan tidak perlu lagi bergantung pada supply produk luar negeri.

c) Menciptakan lapangan kerja

Pemerintah perlu mendorong perkembangan industri pertahanan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini dapat mendorong perkembangan industri pertahanan melalui berbagai kebijakan. Industri pertahanan yang berkembang dapat menyerap tenaga kerja dari berbagai latar belakang pendidikan dan keterampilan, dalam hal ini industri pertahanan membutuhkan tenaga kerja dari berbagai bidang seperti, manufaktur, teknik dan teknologi informasi serta bidang lainnya. Menyediakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tidak hanya itu menyediakan lapangan kerja baru juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, serta mampu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di indonesia.

TANTANGAN KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN ERA SOCIETY 5.0

Kemandirian industri pertahanan merupakan aspek krusial dalam memperkuat pertahanan negara dan menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Industri pertahanan memiliki peran strategis dalam menyediakan Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsista) yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Hal ini sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Johnson (2022)

mengenai pentingnya investasi yang memadai dalam sektor pertahanan untuk memperkuat kemampuan pertahanan suatu negara.

Dilihat dari aspek keamanan nasional, anggaran pertahanan Indonesia yang mengalami kenaikan sebesar 10,1% menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Kenaikan anggaran ini penting mengingat Indonesia menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Modernisasi alutsista TNI merupakan salah satu upaya penting untuk meningkatkan kemampuan TNI dalam menghadapi berbagai ancaman, sebagaimana disarankan oleh Rizal (2023) dalam penelitiannya mengenai strategi anggaran pertahanan.

Namun, upaya mencapai kemandirian industri pertahanan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurang memadainya anggaran pertahanan. Anggaran pertahanan Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan anggaran negara-negara maju seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia, sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitian oleh Abdullah (2021) tentang perbandingan anggaran pertahanan global. Anggaran pertahanan Indonesia tahun 2023 sebesar Rp 132,9 triliun. Angka ini masih relatif kecil dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara-negara maju, seperti Amerika Serikat (AS) yang mencapai US\$ 770 miliar, China yang mencapai US\$ 252 miliar, dan Rusia yang mencapai US\$ 66 miliar. Anggaran pertahanan yang kecil dapat menghambat kemampuan Indonesia untuk modernisasi alutsista TNI dan memenuhi kebutuhan pertahanan negara.

Tantangan lainnya adalah teknologi yang masih belum memadai. Indonesia masih tertinggal dari negara-negara maju dalam hal teknologi, kualitas, dan kuantitas industri pertahanan, seperti yang dijelaskan dalam studi oleh Sulaiman (2020) mengenai potensi industri pertahanan Indonesia. Hal ini menimbulkan ketergantungan pada impor produk alutsista dari negara lain, mengurangi kemandirian industri pertahanan. Industri pertahanan Indonesia masih tertinggal dari industri pertahanan negara-negara maju, baik dari segi teknologi, kualitas maupun kuantitas. Ketertinggalan industri pertahanan Indonesia dapat menjadi ancaman bagi pertahanan negara.

Kurangnya terintegrasi ekosistem industri pertahanan juga menjadi hambatan dalam perkembangan industri ini, seperti yang dibahas dalam penelitian oleh Putri (2022) tentang sinergi dalam ekosistem industri pertahanan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan tersebut.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menerapkan kebijakan fiskal yang mendukung kemandirian industri pertahanan. Kebijakan fiskal, sebagaimana dijelaskan oleh Feranika dan Haryati (2020), merupakan instrumen pemerintah dalam mengatur pendapatan dan belanja negara. Kebijakan ini dapat berupa memberikan insentif fiskal untuk pembelian produk-produk pertahanan buatan Indonesia, memberikan subsidi untuk penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan, serta memberikan pinjaman dengan suku bunga rendah kepada industri pertahanan.

Insentif fiskal seperti potongan pajak, pengembalian pajak, atau pembebasan pajak dapat mendorong pertumbuhan industri pertahanan, sesuai dengan yang diungkapkan dalam studi oleh Aditya (2020) mengenai peran pajak dalam perekonomian. Subsidi untuk penelitian dan pengembangan, sebagaimana disarankan oleh Badri (2021) dalam penelitiannya, dapat membantu industri pertahanan mengembangkan teknologi baru yang memadai. Sementara itu, pinjaman dengan suku bunga rendah, seperti yang dijelaskan oleh Soeharto (2019) dalam studinya, dapat membantu industri pertahanan membiayai investasi dan pengembangan produk-produk pertahanan.

Dengan penerapan strategi kebijakan fiskal yang tepat, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan dalam mencapai kemandirian industri pertahanan di era Society 5.0.

Hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan kemampuan pertahanan negara, dan menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Dalam konteks globalisasi dan persaingan di dunia industri pertahanan, langkah-langkah ini menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk tetap relevan dan mandiri dalam sektor pertahanan. Kemandirian industri pertahanan merupakan hal yang penting untuk memperkuat pertahanan negara dan menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan industri pertahanan berperan penting dalam menyediakan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dibutuhkan oleh TNI untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Instrument kebijakan fiskal yang paling utama adalah penerimaan dan pengeluaran. Menurut Aditya, 2020 pajak merupakan komponen terpenting dalam menentukan kondisi suatu makroekonomi negara. Kebijakan fiskal dalam sudut pandang makroekonomi dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan kontraktif dan kebijakan ekspansif. Kebijakan kontraktif digunakan untuk mengurangi permintaan agregat dengan cara mengurangi daya beli masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pajak, mengurangi belanja pemerintah atau meningkatkan suku bunga. Sedangkan kebijakan ekspansif bertujuan untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Biasanya diterapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau mengurangi pengangguran.

Era Society 5.0 ditandai dengan perkembangan teknologi yang pesat, termasuk di bidang pertahanan. Hal ini menuntut industri pertahanan Indonesia untuk terus berinovasi dan mengembangkan teknologi pertahanan yang baru. Untuk mendukung kemandirian industri pertahanan di era Society 5.0, pemerintah dapat menerapkan strategi kebijakan fiskal. Adapun kebijakan fiskal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung kemandirian industri pertahanan.

- Memberikan insentif fiskal untuk pembelian produk-produk pertahanan buatan Indonesia.

Insentif fiskal ini dapat berupa potongan pajak, pengembalian pajak, atau pembebasan pajak. Memberikan insentif pajak untuk pembelian produk-produk pertahanan buatan Indonesia dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan industri pertahanan, meningkatkan daya saing, atau meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk pertahanan buatan Indonesia. Pertimbangan kebijakan fiskal dalam menentukan jenis dan besarnya insentif pajak dengan tujuan untuk memastikan bahwa insentif pajak tersebut tidak mengganggu stabilitas fiskal. Insentif pajak ini dapat mendorong masyarakat dan pemerintah untuk menggunakan produk-produk pertahanan buatan Indonesia.

- Memberikan subsidi untuk penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan.

Pemerintah Indonesia dapat memberikan subsidi penelitian dan pengembangan kepada industri pertahanan untuk mengembangkan teknologi baru dalam bidang pertahanan udara. Teknologi baru ini dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara Indonesia, sehingga dapat lebih melindungi wilayah udara Indonesia dari ancaman. Subsidi ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saingnya. Namun, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak ekonomi dari pemberian subsidi penelitian dan pengembangan. Apakah subsidi penelitian dan pengembangan tersebut akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap perekonomian?

- Memberikan pinjaman dengan suku bunga yang rendah untuk industri pertahanan.

Pemerintah Indonesia dapat memberikan pinjaman dengan suku bunga yang rendah kepada industri pertahanan untuk membiayai pengadaan pesawat tempur baru. Pesawat tempur baru ini dapat meningkatkan kemampuan pertahanan udara Indonesia, sehingga

dapat lebih melindungi wilayah udara Indonesia dari ancaman. Dalam hal ini pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan fiskal secara keseluruhan dalam menentukan jenis dan besarnya pinjaman dengan suku bunga yang rendah untuk memastikan bahwa pinjaman dengan suku bunga yang rendah apakah untuk mendorong pertumbuhan industri pertahanan, meningkatkan daya saing, atau meningkatkan kemandirian industri pertahanan. Pinjaman ini dapat membantu industri pertahanan untuk membiayai investasi dan pengembangan produk-produk pertahanan.

STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL UNTUK Mendukung Kemandirian Industri Pertahanan.

Strategi kebijakan fiskal yang efektif sangat penting dalam mendukung kemandirian industri pertahanan di era Society 5.0. Penelitian oleh Johnson (2022) menyoroti pentingnya investasi yang memadai dalam sektor pertahanan untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara. Oleh karena itu, untuk meningkatkan anggaran pertahanan, pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk belanja pertahanan. Hal ini tidak hanya membantu pertumbuhan industri pertahanan tetapi juga meningkatkan daya saing dan inovasi dalam industri tersebut.

Memberikan insentif fiskal yang tepat juga merupakan strategi yang efektif dalam mendukung industri pertahanan. Gupta (2020) dalam studinya mengenai insentif fiskal dalam mendorong investasi industri, menunjukkan bahwa pengurangan tarif pajak impor dan tarif pajak penghasilan (pPh) dapat mendorong pertumbuhan industri pertahanan dengan menurunkan biaya produksi. Selain itu, pemberian beasiswa, pelatihan, dan subsidi juga dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan inovasi dalam industri pertahanan, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lim & Patel (2023) tentang pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap pengembangan industri.

Meningkatkan regulasi yang mendukung pertahanan juga menjadi strategi penting. Choi & Cohen (2021) dalam penelitiannya mengenai pentingnya regulasi yang sesuai dalam mendorong perkembangan industri, menyoroti bahwa regulasi yang jelas dan mendukung pertumbuhan industri pertahanan dapat memberikan kepastian kepada para pelaku industri. Regulasi yang mendukung seperti pengurangan birokrasi, pemberian insentif khusus, dan perlindungan kekayaan intelektual juga dapat mempercepat pertumbuhan industri pertahanan.

Terakhir, sinergisitas antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, industri pertahanan, media, akademisi, dan masyarakat merupakan langkah krusial dalam mengimplementasikan strategi kebijakan fiskal. Ramadhan (2022) dalam konteks sinergi antar pemangku kepentingan dalam industri, menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara semua pihak untuk memastikan bahwa strategi ini dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Dengan mengimplementasikan strategi kebijakan fiskal ini secara terpadu, pemerintah dapat mendukung kemandirian industri pertahanan di era Society 5.0, yang pada gilirannya akan memperkuat pertahanan negara dan menjaga kedaulatan bangsa Indonesia, sesuai dengan rekomendasi yang diuraikan oleh berbagai penelitian terkait. Ini juga sesuai dengan konsep Society 5.0 yang menekankan kolaborasi dan integrasi antara manusia, teknologi, dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan yang telah disampaikan adalah bahwa strategi kebijakan fiskal memainkan peran krusial dalam mendukung kemandirian industri pertahanan di era Society 5.0. Peningkatan anggaran pertahanan menjadi prioritas utama karena hal ini tidak

hanya memperkuat pengembangan alutsista (alat utama sistem senjata) tetapi juga mendukung penelitian dan pengembangan teknologi inovatif yang sangat dibutuhkan dalam konteks pertahanan modern.

Selain itu, pemberian insentif pajak seperti potongan pajak penghasilan dan pembebasan pajak pertambahan nilai di sektor industri pertahanan dapat menarik investasi yang sangat diperlukan untuk mengembangkan kemampuan industri dalam negeri. Skema pembiayaan khusus dengan bunga rendah juga dianggap efektif dalam mendukung pengembangan alutsista dan memfasilitasi perusahaan pertahanan lokal untuk mengakses modal dengan lebih mudah.

Kerjasama strategis dengan negara-negara maju dalam industri pertahanan menjadi penting karena hal ini tidak hanya memberikan akses terhadap teknologi tinggi tetapi juga memungkinkan transfer pengetahuan yang krusial dalam meningkatkan kemampuan industri pertahanan Indonesia.

Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi fokus penting dalam upaya mencapai kemandirian industri pertahanan. Program pendidikan dan pelatihan vokasi serta kolaborasi dengan lembaga riset dan universitas sangat dibutuhkan untuk menghasilkan tenaga kerja berkualitas dan mendorong inovasi dalam industri pertahanan.

Meskipun kemandirian industri pertahanan memberikan manfaat signifikan seperti meningkatkan kemampuan pertahanan negara, mengurangi ketergantungan pada impor, dan menciptakan lapangan kerja, tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan anggaran, teknologi yang belum memadai, dan kurangnya integrasi dalam ekosistem industri pertahanan.

Dengan implementasi strategi kebijakan fiskal yang tepat, seperti peningkatan anggaran pertahanan, pemberian insentif fiskal yang sesuai, peningkatan regulasi, dan sinergisitas antar angkatan kepentingan, kemandirian industri pertahanan di era Society 5.0 dapat terwujud. Namun, hal ini juga memerlukan koordinasi dan kerjasama yang kuat antara pemerintah, industri pertahanan, akademisi, dan masyarakat untuk menerapkan strategi ini dengan efektif.

DAFTAR PUSAKA

Buku:

- Efendi, E., Sutrisna, I., & Rahayu, R. (2022). *Strategi Membangun Industri Pertahanan Nasional: Menuju Kemandirian dan Kemajuan Teknologi*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Feranika, R., & Haryati, S. (2020). *Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Ekonomi di Indonesia*. Penerbit CV Pustaka Cendekia.
- Wijayanti, M. D., & Ngandiman, A. (2023). *Kebijakan Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Penerbit Deepublish.

Jurnal:

- Aqmarina, L. (2020). Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 315-328.
- Choi, J. H., & Cohen, D. (2021). The Role of Government in Supporting the Defense Industry: A Case Study of South Korea and Israel. *Journal of International Business Policy*, 24(4), 1222-1242.
- Choi, J. H., & Tan, G. (2021). Innovation in the Defense Industry: The Role of Government, Industry, and Academia. *Asian Business & Management*, 20(3), 545-562.
- Gupta, S. (2020). The Role of Defense Industry in National Security: A Case Study of India. *Journal of Defense Management*, 12(2), 23-40.
- Johnson, R. W. (2022). The Future of the Defense Industry in the Era of Society 5.0. *Defense & Security Analysis*, 48(2), 225-243.
- Kumar, S., & Lee, H. S. (2022). The Impact of Industry 4.0 on the Defense Industry: A Review of Challenges and Opportunities. *Technological Forecasting and Social Change*, 182, 121769.

- Lim, H., & Patel, P. (2023). Cybersecurity Threats and Challenges in the Defense Industry: A Case Study of Singapore. *International Journal of Critical Infrastructure Protection*, 68, 102435.
- Ramadhan, A. (2022). The Role of Fiscal Policy in Supporting Defense Industry Independence: A Case Study of Indonesia. *Journal of Public Budgeting, Management & Policy*, 1(1), 78-93.
- Singh, A. (2023). The Challenges and Opportunities of the Defense Industry in the Era of Society 5.0: A Perspective from India. *International Journal of Technology Management*, 66(1-2), 14-36.
- Smith, R. (2023). Emerging Technologies and the Future of Warfare: Implications for the Defense Industry. *Defense Systems Review*, 18(2), 22-35.

Laporan:

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). *Masterplan Industri Pertahanan 2024-2029*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Situs Web:

Bank Indonesia. (2023). Kebijakan Fiskal. <https://www.bi.go.id/>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Anggaran Pertahanan Negara. https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2022/07/PMK_2018_143_Mekanisme-Pelaksanaan-Anggaran-Belanja-Negara-di-Lingkungan-Kemhan-dan-TNI.pdf